MENELUSURI KONSEP DAN URGENSI DASAR NEGARA

NADIA

nadasapolenggu77@gmail.com

20220067

AKBP. STIE "KBP"

A. PENDAHULUAN

pendidikan pancasila ,kebijakan nasional pembangunan bangsadan karakter; landasan hukum pendidikan pancasila; kerangka konseptual pendidikan pancasila; visidan misi; tujuan pendidikan pancasila; desain mata kuliah; kompetensi inti dan kompetensi dasar. Padabagian pengantar ini, mahasiswa diajak untuk memahami konsep, hakikat, dan perjalanan pendidikan pancasila di Indonesia.

Selain itu, kebijakan penyelenggaraan pendidikan pancasila di perguruan tinggi tidak serta merta diimplementasikan, baik diperguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Keadaan

tersebut terjadi karena dasar hukum yang mengatur berlakunya pendidikan pancasila di perguruan tinggi selalu mengalami perubahan dan persepsi pengembang kurikulum di perguruan tinggi berganti-ganti.

Lahirnya ketentuan dalam pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Pancasila yang menunjukkan nilai – nilai pancasila dari anak - anak bangsa.

1. supaya mahasiswa/i mengetahui arti dari pancasila pentingnya penerapan nilai Pancasila di lingkungan kampus, lantaran Pancasila salah satu pilar negara Indonesia, yang penerapannya sebagai pedoman baik dalam masyarakat maupun akademik dan mutlak bagi mahasiswa.

“Secara general, nilai Pancasila yang perlu ditanamkan mahasiswa adalah nilai saling toleransi antar umat beragama, apalagi mahasiswa di UIN yang homogeny secara religi. Sebagai mahasiswa yg terbiasa dengan lingkup homogen, penting sekali bagi kita untuk menanamkan nilai toleransi dan menanamkan rasa nasionalisme,” bentuk implementasi nilai Pancasila yaitu salah satunya mewariskan kembali nilai Pancasila kepada generasi muda di bawahnya, agar kelak generasi penerus tidak lambat dalam penanaman nilai Pancasila tersebut.

2. supaya mahasiswa/i menerapkan dasar pancasila di kehidupan sehari dan lingkungan

Sebagai warga negara yang taat terhadap peraturan dan norma-norma yang ada dalam negara Indonesia, sepatutnya kita harus mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang Ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi pilar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pilar-pilar itu tercermin dalam kehidupan tiap-tiap nilai atau sila Pancasila. Penerapan atau

implementasi sila-sila dalam Pancasila merupakan hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap warga negara. Akan tetapi saat ini semakin lama pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila justru semakin memudar. Pengaruh masuknya budaya asing dan perkembangan teknologi di tengah kehidupan masyarakat yang selalu diikuti tanpa adanya penyaringan atau seleksi merupakan salah satu penyebab semakin terkikisnya rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Pengertian Menelusuri konsep dan Dasar Negara

1. Konsep Negara

Menurut Diponolo (1975: 23-25) negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan

pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara yaitu:

- a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau *territoire*
- b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa
- c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.

Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif ada juga unsur lain, yaitu unsur *deklaratif*, dalam hal ini pengakuan dari negara lain. Bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan/cara mewujudkan tujuan negara tersebut, akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara.

2. Konsep Tujuan Negara

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara.

3. Konsep dan Urgensi Dasar Negara

Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan

Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila

sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sebagai contoh:

1. Percaya kepada Tuhan dan toleran,
2. Gotong royong,
3. Musyawarah,
4. Solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya.

nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila.sebagai berikut:

1.Masalah Kesadaran Perpajakan

Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilaiPancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karna itu perlu diungkapberbagi permasalahan dinegri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikanpancasila

2.Masalah Korupsi

Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik dipusat maupun di daerah. TransparencyInternational merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI terseut,Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan Negara paling korup di dunia

.3.Masalah Lingkungan

Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun citra tersebut perlahan mulai pudar seiring dengan maraknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian dan beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan.

4. Masalah Disintegrasi Bangsa

Demokratisasi mengalir dengan deras menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Disamping menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan Negara Republik Indonesia, reformasi juga menghasilkan dampak negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa.

5. Masalah Dekadensi Moral

Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianatan dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan, perilaku kekerasan juga acapkali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga.

6. Masalah Narkoba

Dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif.

7. Masalah Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem

hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Memang banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparaturnya.

8. Masalah Terorisme

Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama.

C. PENUTUP

negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 (tiga) unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya

negara yaitu:

- a. Unsur tempat, atau daerah, wilayah atau territoir
- b. Unsur manusia, atau umat (baca: masyarakat), rakyat atau bangsa
- c. Unsur organisasi, atau tata kerjasama, atau tata pemerintahan.

.Konsep Tujuan Negara

Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi 2 (dua), yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara.

Konsep dan Urgensi Dasar Negara

Dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kesamaan kepentingan diantarasesamawargamasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah – Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.

Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015

Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jurnal Selat, Voleme 4, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, Justicia Islamica, Volume 13, Nomor 2, 2016.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, Veritas et Justitia, Volume 2, Nomor 1, 2016.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hiearki Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia*, Lex Junalica, Volume 13, Nomor 3 , 2016

Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai Slate Auxiliary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, Justicia Islamica, Volume 14, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Perana Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Doctrinal, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1 st Ushuluddin and Islamic Thought international Conference (Unicon), Volume 1, 2017

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-undang Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal menara Ekonomi : Penelitian Dan kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020

Laurensius Arliman S, *Pendidikan kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/11jih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Jounal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi, firgi Nurdiansyah , Laxmy Defifah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zaskia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, Nomor, 2020.

Laurensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020. [http://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vo14\(1\).3779](http://doi.org/10.25299/uirrev.2020.vo14(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Alif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Contitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceedi : International Comperence On Humanity, Law And Sharia (Icflash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang –Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.